BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) dengan baik akan menghasilkan kinerja yang optimal bagi perusahaan (Espinardo, 2016). Pengelolaan kinerja diperlukan untuk ketercapaian tujuan perusahaan agar menjadi sebuah konsep manajemen kinerja yang baik. Kinerja sebuah perusahaan dapat digunakan sebagai alat kendali yang terdiri dari kegiatan implementasi dan evaluasi atas kinerja pegawai dan kegiatan operasional perusahaan (Stam, Arzlanian, & Elfring, 2013; Sebahattin, Ba, & Ta, 2014). Membangun kinerja telah menjadi tujuan utama bagi banyak perusahaan karena akan menciptakan tingkat probabilitas yang lebih tinggi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan perusahaan pesaing lainnya (Sapienza, 2015; Trade & Networks, 2015).

Perusahaan memerlukan kinerja yang baik, hal ini penting karena kinerja dapat dijadikan sebagai unggulan tersendiri (Huhtala, 2014; Sebahattin et al., 2014). Perkembangan konsep kinerja muncul dalam 30 tahun terakhir sebagai salah satu isu penting yang dibahas dan dipahami dalam manajemen sumber daya manusia. Kinerja dapat dikatakan sebagai proses dalam manajemen yang di bentuk untuk menghubungkan tujuan organisasi atau korporasi dengan tujuan individu (Shehu, 2014; Martinez-simarro, Devece, & Llopis-albert, 2015). Tercapainya tujuan perusahaan dapat dibantu melalui kinerja dengan cara mengoptimalkan performa bisnisnya (Mahmoud, Blankson, Owusu-frimpong, & Nwankwo, 2016).

Beberapa industri telah menjadi objek penelitian mengenai konsep kinerja seperti industri bioteknologi (L. A. Hall & Bagchi-Sen, 2002), industri hotel (L. A. Hall & Bagchi-Sen, 2002), industri teknologi (Camisón & Villar-lópez, 2014; Shaikh & Karjaluoto, 2015), dan industri perbankan syariah (Bashir, 2011). Industri perbankan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan, hal ini ditunjukkan dengan posisi aset perbankan syariah yang kini sudah mencapai 100 triliun. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan dari kalangan masyarakat bahwa mengapa harga pembiayaan

pada perbankan syariah lebih tinggi dari pada perbankan konvensional, termasuk beberapa bank syariah di negara muslim yang ada di kawasan Asia Tenggara (Arsyianti, 2011).

Bank-bank Islam di berbagai negara yang berbeda memiliki peraturan yang berbeda di lingkungannya, sehingga kinerja perbankan syariah terus menjadi masalah (Nomran, Haron, & Hassan, 2016). Rasio modal dan portofolio pinjaman yang memadai merupakan respon positif profitabilitas Bank Islam terhadap kenaikan rasio modal dan pinjaman yang berperan empiris dalam menjelaskan kinerja sebuah perbankan syariah (Bashir, 2011). Profitabilitas dan efisiensi dapat diprediksi melalui karakteristik perbankan, baik karakteristik internal maupun eksternal.

Perbankan syariah menerapkan sistem bagi hasil untuk mempertahankan kinerjanya agar tidak hanyut oleh melonjaknya tingkat suku bunga simpanan, sehingga beban operasional bank syariah dapat lebih rendah dari bank konvensional (Qu & Zhang, 2015). Efektivitas perbankan syariah sebagai fungsi intermediasi tetap terjaga seiring pertumbuhan dana yang dihimpun maupun pembiayaan yang relatif tinggi dibandingkan perbankan nasional, serta penyediaan akses jaringan yang meningkat dan menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih luas sehingga hal tersebut dapat membuat kinerja keuangan perbankan syariah lebih baik (Sabir, Ali, & Habbe, 2012).

Islam mengajarkan untuk menerapkan prinsip yang melibatkan fungsi kekhalifaan manusia di bumi, bisnis yang dijalankan harus memberikan manfaatuntuk banyak orang. Hal ini memiliki maksud bahwa tujuan bisnis harus sejalan dengan tujuan syariah (*maqasid al-shariah*) (Arsyianti, 2011). Prinsip yang diajarkan oleh Islam tersebut berbeda dengan prinsip bisnis dari pandangan ahli yang berasal dari barat. Para ahli tersebut memiliki prinsip bahwa bisnis seharusnya diperlakukan sebagaimana manusia dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Bisnis harus dapat menjadi pusat 3W, yaitu *worship* (peribatan), *wealth* (kesejahteraan), dan *welfare* (pemberdayaan umat) (Mallin, Farag, & Ow-Yong, 2014).

Efek globalisasi yang terjadi saat ini, menjadikan kinerja dalam perbankan syariah sebuah hal yang sangat penting, karena globalisasi telah menempatkan

persaingan yang tinggi antara bank-bank Islam dengan bank-bank tradisional yang berkembang dengan baik. Sistem perbankan benar-benar telah diubah menjadi model Islam dalam beberapa negara tertentu (Bashir, 2011). Sebuah survei yang diterbitkan bulan November 2011 pada majalah *Bankers* tentang lembaga keuangan Islam teratas oleh negara, menyatakan bahwa terdapat 160 bank syariah dengan 100% aset sesuai syari'at Islam (Mallin et al., 2014). Kinerja bank dan pertumbuhanya yang terus berlanjut diukur melalui pengembalian aset dan imbal hasil ekuitas (Mallin et al., 2014).

Penelitian mengenai kinerja perbankan syariah di negara lain seperti di Timur Tengah (Bashir, 2011), Mesir (Fayed, 2013), Bangladesh (Sarker, 1999) dan Pakistan (Akhter et al., 2011) dan (Usman & Khan, 2012) menunjukkan hasil yang sejalan bahwasannya di negara-negara tersebut di atas, perbankan syariah memiliki pertumbuhan dan profitabilitas lebih tinggi dibandingkan perbankan konvensionalnya. Disisi lain, dalam hal permodalan perbankan syariah masih dengan jumlah yang lebih kecil dibandingkan perbankan konvensional. Untuk itu, bank syariah perlu perhatian serius dalam manajemennya (Akhter et al., 2011). Penemuan tersebut mengindikasikan bahwa Bank Islam masih mempunyai perjalanan jauh yang harus ditempuh (Fayed, 2013).

Perbankan dan keuangan syariah di Asia telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cepat, seperti digambarkan pada Tabel 1.1.

TABEL 1.1
RINCIAN SEGMEN KEUANGAN SYARIAH DUNIA PADA TAHUN 2015

Region	*Banking Assets*	*Sukuk Outstanding*	*Islamic Funds AuM*	*Takaful Contribution*
Asia	203.8	188.4	23.2	3.9
GCC	564.2	95.5	33.5	9.0
MENA (exc. GCC)	633.7	0.1	0.3	7.7
Sub-Sahara Afrika	20.1	1.3	1.8	0.6
Lainnya	54.4	9.4	17.0	0.3
Total	1,476.2	294.7	75.8	21.4

Sumber : IFSA, 2015.

Data pada tabel diatas menunjukkan rincian segmen keuangan syariah berdasarkan beberapa Negara di dunia dan membandingkan ukuran aset perbankan syariah di Asia dengan Negara bagian lainnya, Negara yang memiliki asset perbankan paling tinggi yaitu MENA (*Middle East and North Africa*) sebesar 633.7 dan yang memiliki aset perbankan paling rendah yaitu wilayah Sahara Afrika sebesar 20.1 sedangkan wilayah Asia memiliki aset perbankan sebesar 203.8. Gambar 1.1 yang menunjukkan porsi aset yang dimiliki oleh perbankan syariah dari berbagai Negara.

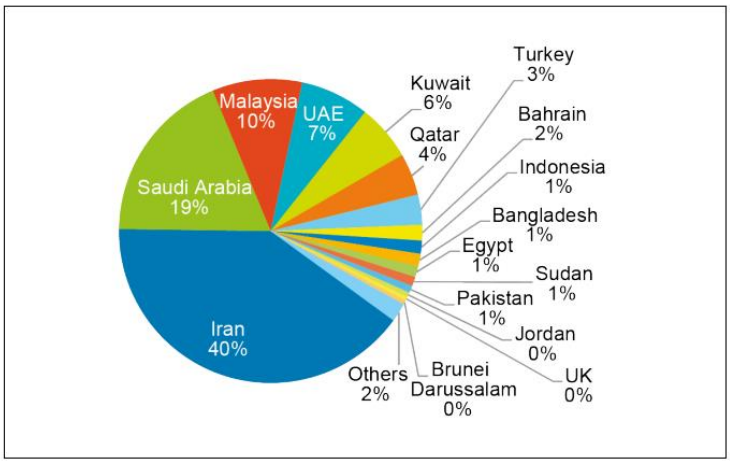

Sumber: IFSA, 2015.

GAMBAR 1.1
ASET PERBANKAN SYARIAH GLOBAL PADA TAHUN 2015

Data pada gambar diatas menunjukkan pertumbuhan aset pada perbankan syariah di berbagai Negara, Iran merupakan Negara yang memiliki aset perbankan syariah yang paling besar yaitu sebanyak 40% sedangkan asset perbankan paling rendah yaitu Negara Brunei Darussalam, UK, dan Jordan yaitu sebanyak 0%. Begitu juga dengan Negara Indonesia yang hanya memiliki asset perbankan sebesar 1%. Aset perbankan syariah dan produk keuangan di Asia jauh lebih besar daripada di Eropa dan Amerika Utara, sebagian besar karena pasar keuangan Islam Malaysia, seperti digambarkan pada Tabel 1.2.

TABEL 1.2
PERTUMBUHAN ASET PADA PERBANKAN SYARIAH DAN PRODUK KEUANGAN DI ASIA TAHUN 2015

Negara	Total
Malaysia	70,5%
Indonesia	9,5%
Pakistan	5,3%,

Sumber: ADB-IFSB, 2015.

Data pada tabel diatas menunjukkan pertumbuhan aset pada perbankan syariah dan produk keuangan di Malaysia lebih tinggi yaitu sebesar 70,5% ($ 135,5 miliar), diikuti oleh Indonesia 9,5% ($ 20,2 miliar) dan Pakistan (5,3%, $ 10,2 miliar). Menurut (Rama, 2015), tingginya pertumbuhan aset pada perbankan syariah di Malaysia dibandingkan dengan Indonesia dan Pakistan tidak terlepas dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia, yaitu diantaranya 1) Inisiatif pembentukan bank syariah di Malaysia merupakan kebijakan pemerintahan Mahathir Muhammad sebagai Perdana Menteri pada saat itu yang berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kebijakan pemerintah dalam rangka untuk memberikan pengaruh positif dalam pengembangan negara (Kayadibi, 2010). Sebagai tindak lanjut atas kebijakan tersebut, Dewan Penasehat Islam (*Islamic Consultative Board*) menginstruksikan bahwa setiap usaha pembangunan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pendirian Bank Islam Malaysia Berhard pada tahun 1983 adalah manifestasi atas kebijakan pemerintah tersebut. Sebagai respon atas keinginan masyarakat dan pemerintah, UU Perbankan Syariah Tahun 1983 diterbitkan. UU ini menjadi pijakan dasar pendirian bank syariah pertama di Malaysia. UU tersebut memberikan kewenangan Bank Negara Malaysia sebagai Bank Sentral untuk mengawasi dan mengatur bank Islam di Malaysia. Di tahun yang sama, pemerintah Malaysia juga menerbitkan UU Investasi Pemerintah yang memungkinkan pemerintah untuk menerbitkan sertifikat investasi pemerintah, yaitu sebagai surat utang pemerintah yang sesuai dengan prinsip Islam, dan dana-danya wajib dikelola bank syariah. Di samping itu, menurut Ahmad Buchori (Direktur Pengaturan Pengembangan Perizinan dan Pengawasan Perbankan Syariah OJK) pada

wawancaranya dengan detik*Finance* pada tanggal 13 Juni 2015 mengemukakan pemerintah Malaysia juga mengeluarkan kebijakan yang mengatur keharusan dana-dana perusahaan milik negara dan BUMN agar disimpan pada perbankan syariah, 2) Operasional perbankan syariah di Malaysia menggunakan sistem "*Islamic Window*" dimana semua bank komersil diberikan peluang untuk menawarkan produk dan layanan perbankan syariah di samping layanan konvensional mereka. Selanjutnya, pada tahun 1999, BNM memperkenalkan konsep *subsidiary* perbankan syariah (*Islamic banking subsidiary*) yang membolehkan lembaga keuangan yang menerapkan skema "*Islamic Window*" untuk mengkonversi dan membentuk bank umum syariah (*full-fledged Islamic bank*). Pada era ini, sistem perbankan syariah di Malaysia mulai tumbuh subur dan menjadi lebih kompetitif yang kemudian mendorong bank asing masuk ke Malaysia, 3) Pemerintah Malaysia menerapkan kebijakan liberalisasi keuangan dimana lembaga keuangan asing diberikan izin untuk mendirikan bank asing syariah di Malaysia. Adapun hasil dari kebijakan liberalisasi sistem ini adalah masuknya lembaga keuangan dari negara Timur Tengah dalam pasar perbankan Malaysia, yaitu *Al Rajhi Banking* & *Investment Corporation*, *Asian Finance Bank* dan Kuwait *Finance House* (Ruzian dan Norilawati, 2008), 4) Industri keuangan syariah Malaysia sudah eksis selama lebih dari 30 tahun, sehingga dengan pengalaman lebih dari 30 tahun tersebut, sistem perbankan syariah di Malaysia sudah memiliki infrastruktur pengembangan sistem perbankan syariah yang relatif lengkap dan komprehensif.

Di Indonesia, perkembangan perbankan syariah belum didukung sepenuhnya oleh pemerintah baik dari sisi regulasi atau pengaturan yang menjadi dasar hukum pengembangan industri perbankan syariah secara lebih kondusif, juga belum adanya kebijakan pemerintah yang berpihak kepada peningkatan aktivitas perbankan syariah untuk ikut serta mengelola dana pemerintahan pusat atau daerah dan dana BUMN/BUMD. Namun demikian, kondisi ini membuat insan-insan industri perbankan syariah menjadi lebih termotivasi untuk melakukan inovasi dan kreatifitas dalam pengembangan produk dan jasa perbankan syariah yang lebih baik dan mendorong

sumber daya insani yang dimiliki bank syariah untuk meningkatkan kapasitasnya supaya bias *survive* dan berkompetisi dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

Kinerja suatu bank dapat dilihat dari pertumbuhan asetnya. Perkembangan pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan, seperti digambarkan pada Tabel 1.3.

TABEL 1.3
PERTUMBUHAN ASET PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL TAHUN 2014-2017

(DALAM MILIAR RUPIAH)

Total Aset	2014	2015	*Growth*	2016	*Growth*	2017	*Growth*
Syariah	272.343	296.262	8,07%	356.504	20,33%	424.181	18,98%
Konvensional	5.615.150	6.095.908	7,89%	6.729.799	9,42%	7.387.144	8,90%

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, data diolah sendiri.

Data pada tabel di atas menunjukkan pertumbuhan aset pada perbankan syariah lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional, yaitu sebesar 8,07%; 20,33% dan 18,98% pada tahun 2015, 2016 dan 2017. Sedangkan pada perbankan konvensional persentase angka pertumbuhannya sebesar 7,89% pada tahun 2015 lalu 9,42% dan 8,90% pada tahun 2016 dan 2017. Pertumbuhan mengenai total asset dan simpanan dapat dikategorikan sebagai pertumbuhan secara organik maupun non-organik (Ismal, 2012). Beberapa hal yang mencerminkan pertumbuhan organik dilihat dari sisi aset misalnyajumlah pembiayaan bertambah, sedangkan pertumbuhan non-organik dapat dilihat melalui bertambahnya alternatif *outlet* pembiayaan. Namun dari sisi nominal sebagaimana diperlihatkan lebih lanjut pada Tabel 1.4, nominal aset pada perbankan syariah masih jauh lebih kecil dibandingkan nominal aset pada perbankan konvensional. Hal ini terjadi juga pada nominal penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana. Berikut Tabel Perbandingan *Market Share* Industri perbankan Syariah terhadap perbankan nasional dari Tahun 2014-2017 (dalam Miliar Rupiah).

TABEL 1.4
PERBANDINGAN *MARKET SHARE* PADA INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH 2014-2017 (DALAM MILIAR RUPIAH)

Indikator	2014	Market Share	2015	Market Share	2016	Market Share	2017	Market Share
Aset Syariah	272,343	4.63%	296,262	4.63%	356,504	5.03%	424,181	5.43%
Aset BUK	5,615,150	95.37%	6,095,908	95.37%	6,729,799	94.97%	7,387,144	94.57%
JUMLAH	5,887,493	100%	6,392,170	100%	7,086,303	100%	7,811,325	100%
Dana Bank Syariah	217,858	4.53%	231,175	4.5%	279,335	4.92%	344,719	5,35%
Dana BUK	4,594,876	95.47%	4,909,707	95.5%	5,399,210	95.08%	5,921,000	94.65%
JUMLAH	4,812,734	100%	5,140,882	100%	5,678,545	100%	6,255,719	100%
Pembiayaan Syariah	148,425	2.64%	154,526	2.53%	178,043	2.64%	190,382	2.58%
Kredit BUK	5,468,910	97.36%	5,952,279	97.47%	6,570,903	97.36%	7,177,051	97.42%
JUMLAH	5,617,335	100%	6,106,805	100%	6,748,946	100%	7,367,433	100%

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, data diolah sendiri.

Pertumbuhan *market share* industri perbankan syariah tersebut di atas yang stagnan berkisar 5% masih jauh tertinggal dengan penguasaan bank konvensional yang dominan dikisaran 95%. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, sudah selayaknya industri perbankan syariah Indonesia memiliki penguasaan pasaryang signifikan dan tumbuh dengan baik.

Penelitian yang dilakukan di Indonesia mengungkapkan bahwa bank yang meningkatkan deposit dan ROA akan berdampak pada meningkatnya pangsa pasar perbankan Islam di Indonesia. Sedangkan, bank yang menurunkan nisbah akan berdampak pada turunnya pangsa pasar perbankan Islam di Indonesia (Purboastuti, N., Anwar, N. &Suryahani, I., 2015).

Beberapa Bank Pembangunan Daerah mulai mengubah kiblatnya dari konvensional menuju syariah. Berubahnya bank konvensional menjadi syariah memacu pertumbuhan layanan syariah lainnya di daerah tersebut. Ada beragam cara untuk meningkatkan pangsa pasar bank syariah, baik melalui konversi bank konvensional menjadi bank syariah atau mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai unit bisnis bank konvensional yang melayani dengan prinsip syariah.

Pemerintah daerah diberikan kewenangan dan keleluasaan yang jauh lebih besar untuk mengatur daerahnya sendiri termasuk masalah keuangan daerah. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pembangunan di daerah,

salah satunya dengan membentuk suatu badan usaha keuangan milik pemerintah daerah yang disebut dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Hal ini perlu untuk mendorong pemerintah daerah dalam akselerasi perekonomian di daerah tersebut. Berikut data yang menunjukkan perkembangan bank syariah milik pemerintah daerah di beberapa wilayah di Indonesia yang digambarkan pada Tabel 1.5 berikut.

TABEL 1.5
JARINGAN KANTOR INDIVIDUAL BANK PEMBANGUNAN DAERAH SYARIAH TAHUN 2014-2015

No	Unit Usaha Syariah	2014			2015		
		KPO /KC	KCP /UPS	KK	KPO /KC	KCP /UPS	KK
1	Bank DKI	2	10	6	3	12	6
2	Bank DIY	1	2	5	1	3	5
3	Bank Jateng	3	4	2	4	6	5
4	Bank Jatim	3	5	-	5	7	-
5	Bank Jambi	1	-	-	1	-	-
6	Bank Aceh	2	15	-	3	15	-
7	Bank Sumut	5	17	-	5	17	-
8	Bank Sumbar	3	6	-	3	6	-
9	Bank Riau	2	3	-	2	4	-
10	Bank Sumsel & Belitung	3	1	5	3	1	4
11	Bank Kalsel	2	8	1	2	9	1
12	Bank Kalbar	1	2	4	1	2	4
13	Bank Kaltim	2	13	-	2	13	-
14	Bank Sulsel & Sulbar	3	-	1	4	-	1
15	Bank NTB	2	4	1	2	7	1
	TOTAL	**35**	**90**	**25**	**41**	**102**	**27**

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Keterangan :
KP : Kantor Pusat
KPO : Kantor Pusat Operasional
KC : Kantor Cabang
KCP/UPS : Kantor Cabang Pembantu/Unit Pelayanan Syariah
KK : Kantor Kas
- : Tidak termasuk Layanan Syariah

Melihat dari data tersebut dapat dilihat bahwa sudah cukup banyak penyebaran BPD syariah di sejumlah daerah. Meskipun demikian ada sejumlah wilayah yang belum memiliki kantor cabang pembantu atau kantor kas syariah, pada tahun 2014 hingga 2015 di antaranya di daerah Jambi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan

Kalimantan Timur. Berikut data yang menunjukan perkembangan bank syariah di beberapa wilayah di Indonesia pada Tahun 2016-2017 seperti yang digambarkan pada Tabel 1.6 berikut.

TABEL 1.6
JARINGAN KANTOR INDIVIDUAL BANK PEMBANGUNAN DAERAH SYARIAH TAHUN 2016-2017

No	Unit Usaha Syariah	2016			2017		
		KPO /KC	KCP /UPS	KK	KPO /KC	KCP /UPS	KK
1	Bank DKI	3	12	6	3	12	5
2	Bank DIY	1	3	5	1	4	4
3	Bank Jateng	4	8	6	4	10	9
4	Bank Jatim	7	8	-	7	8	-
5	Bank Jambi	1	-	-	1	1	-
6	Bank Aceh	-	-	-	-	-	-
7	Bank Sumut	5	17	-	5	17	-
8	Bank Sumbar	3	6	-	3	6	-
9	Bank Riau	2	4	1	2	4	1
10	Bank Sumsel & Belitung	3	2	4	3	2	4
11	Bank Kalsel	2	9	1	2	9	1
12	Bank Kalbar	1	4	5	1	4	5
13	Bank Kaltim	2	13	2	2	14	2
14	Bank Sulsel & Sulbar	4	-	1	4	-	1
15	Bank NTB	2	7	1	2	7	1
TOTAL		**40**	**93**	**32**	**40**	**98**	**33**

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Keterangan :
KP : Kantor Pusat
KPO : Kantor Pusat Operasional
KC : Kantor Cabang
KCP/UPS : Kantor Cabang Pembantu/Unit Pelayanan Syariah
KK : Kantor Kas
- : Tidak termasuk Layanan Syariah

Data tersebut dapat menunjukkan bahwa peningkatan kantor perbankan syariah milik pemerintah daerah ini terus naik setiap tahunnya, bahkan Unit Usaha Syariah Bank Aceh pada tahun 2016 dikonversi menjadi Bank Umum Syariah (BUS), dengan konsekuensi ada pengurangan UUS Bank Aceh karena di *spin off* menjadi BUS Aceh. Namun disisi lain ada pula daerah yang pertumbuhan tidak berkembang dan seperti

data yang ditunjukan pada Tabel 1.3 yaitu Bank Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jambi. Berikut data yang menunjukan jumlah kantor layanan syariah dan unit usaha syariah BPD Tahun 2013-2017 yang digambarkan pada Tabel 1.7 berikut.

TABEL 1.7
JUMLAH KANTOR LAYANAN SYARIAH DARI UNIT USAHA SYARIAH BPD TAHUN 2013-2017

No	Unit Usaha Syariah	2013	2014	2015	2016	2017
1	Bank DKI	34	64	72	182	214
2	Bank DIY	-	3	10	31	34
3	Bank Jateng	-	131	131	145	150
4	Bank Jatim	37	97	97	191	191
5	Bank Aceh	-	-	-	-	-
6	Bank Sumut	84	121	121	121	121
7	Bank Jambi	-	3	7	7	22
8	Bank Sumbar	5	35	34	34	33
9	Bank Riau	37	51	52	52	52
10	Bank Sumsel & Belitung	-	1	5	15	15
11	Bank Kalsel	15	42	46	48	48
12	Bank Kalbar	5	57	58	65	65
13	Bank Kaltim	10	26	26	26	26
14	Bank Sulsel & Sulbar	-	-	-	-	-
15	Bank NTB	11	6	6	6	6
TOTAL		**238**	**637**	**665**	**923**	**977**

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Layanan Syariah merupakan layanan bank syariah yang dibuka di kantor cabang induknya yang konvensional. Dari data Tabel 1.7 dapat dilihat bahwa perkembangan Layanan syariah dari UUS BPD belum menunjukkan kinerja yang baik. Masih banyak daerah yang perkembangannya masih stagnan. Hanya ada beberapa daerah saja yang mengalami peningkatan dari jumlah layanan syariah dan unit usaha syariah dan itupun jumlahnya tidak begitu meningkat drastis.

Berdasarkan data-data yang telah ditunjukkan di atas, kinerja bank syariah di Indonesia belum menunjukkan pencapaian yang optimal. Pengukuran pada kinerja perusahaan perlu dilakukan sebagai bahan evaluasi perusahaan, apakah telah mencapai tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan atau tidak (Hameed et al, 2004 dalam Harianto, 2013). Analisis kinerja dalam bank syariah dilakukan untuk menjamin dan mengevaluasi bahwa segala bentuk kegiatan perusahaan telah sesuai dengan ketentuan

atau peraturan,baik secara normatif maupun secara ketentuan syariah. Ada beberapa faktor penyebab rendahnya perkembangan pada bank syariah di kalangan masyarakat Indonesia, seperti faktor pengetahuan masyarakat yang tidak merata, masih banyaknya bank-bank konvensional yang beroperasi di Indonesia, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BPD syariah serta proses pemasaran yang belum merata. Padahal jika dilihat dari peluang pasarnya, BPD syariah berpotensi mengalami perkembangan yang lebih maju di Indonesia. BPD syariah dapat diindikasikan lebih memahami dan mengerti pola perilaku masyarakat daerahnya secara langsung, asas syariah yang saat ini tengah gencar dilakukan di berbagai elemen masyarakat, kecanggihan teknologi untuk dapat menjangkau nasabah serta potensi kemajuan daerah yang terus meningkat. Adanya kenyataan bahwa potensi pasar di Indonesia yang terbuka sangat lebar namun kenyatannya BPD syariah belum berkembang seperti yang diharapkan menjadi masalah yang perlu diteliti dan dicari alternatif solusinya.

TABEL 1.8
JUMLAH KANTOR CABANG SYARIAH 2013-2017

No	Nama Bank	2013	2014	2015	2016	2017
1	Bank Muamalat Indonesia	81	84	84	83	83
2	Bank Syariah Mandiri	136	137	137	130	130
3	BNI Syariah	54	67	68	68	68
4	BRI Syariah	51	52	50	52	52
5	Bank BTN Syariah	15	15	21	22	23
6	Bank Permata Syariah	13	11	11	11	11
7	Bank Panin Dubai Syariah	5	8	9	16	17
8	Bank Victoria Syariah	8	8	9	9	9
9	Bank Maybank Syariah	6	8	8	10	10
10	Bank BCA Syariah	5	9	10	10	12
11	Bank Danamon Syariah	25	25	12	11	9
12	Bank bjb Syariah	8	9	9	9	9
13	Bank Mega Syariah	35	35	35	32	28
14	Bank Syariah Bukopin	12	12	12	12	12
15	Bank BTPN Syariah	21	25	26	25	24
16	Bank OCBC NISP	8	8	10	10	10
17	Bank Sinar Mas Syariah	25	28	27	34	34
18	Cimb Niaga Syariah	4	5	10	14	17
19	Bank Aceh Syariah	2	2	3	26	26
TOTAL		**514**	**548**	**551**	**584**	**584**

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Perkembangan perbankan syariah nasional yang non BPD juga mengalami hal yang tidak jauh berbeda dengan perbankan syariah yang didirikan oleh bank-bank BPD dan Pemerintah Daerah. Tabel 1.8 menunjukan perkembangan jumlah kantor cabang syariah nasional (non BPD) tahun 2013-2017.

Melihat dari data tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkembangan jaringan kantor perbankan syariah nasional non BPD di Indonesia menunjukkan perkembangan secara umum cukup baik dari tahun 2013 ke tahun 2017, namun ada sejumlah bank yang mengalami penutupan kantor cabangnya di antaranya Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank Danamon Syariah dan Bank Mega Syariah.

TABEL 1.9
PERKEMBANGAN KINERJA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA
TAHUN 2014-2017

Indikator	2014	2015	2016	2017
Total Aset	272,343	296,262	356,504	424,181
Total Bank	34	34	34	34
Total Kantor	2483	2301	2201	2169

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Melihat dari data tabel tersebut perkembangan industri perbankan syariah di atas dari sisi asset dari tahun 2014 sampai dengan 2017 semakin menunjukkan perkembangan yang semakin baik dengan rata-rata pertumbuhan selama 3 tahun 15,79%. Namun di sisi total bank syariah mengalami pertumbuhan yang stagnan hal ini sebagai akibat dari melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2014 sebesar 5,02%, kondisi perekonomian ini berimbas pada keuangan syariah termasuk perbankan syariah. Sedangkan total kantor mengalami penurunan karena adanya proses konsolidasi internal dan *refocusing* bisnis pada beberapa bank syariah khususnya pada bank umum syariah yang menututup beberapa kantor di luar Jawa yang tidak efektif dan efesien. Sedangkan jumlah kantor bank syariah yang dimiliki oleh bank konvensional relatif stagnan atau tidak ada pertumbuhan jaringan kantor yang signifikan.

Penelitian-penelitian terkait peningkatan kinerja sudah banyak dilakukan sebelumnya, beberapa diantaranya mengkonfirmasi bahwa peningkatan kinerja

perusahaan dapat dilakukan melalui pendekatan SDM. Perkembangan bank syariah yang rendah di Indonesia ditunjukkan dengan kinerjanya yang rendah. Menurut penelitian terdahulu masalah ini dapat diatasi dengan lingkungan bisnis dan strategi operasional (Saputra, 2014), kesuksesan inovasi dan pemilihan teknologi (Hao & Yu, 2011), lingkungan eksternal, kapasitas inovasi dan teknologi juga pengembangan kepemimpinan (Nguyen & Nguyen, 2013), kreasi nilai dan manajemen berbasis nilai (Robu & Ciora, 2015), modal kecakapan, inovasi, kekuatan perusahaan dan analisis lingkungan (Ng, 2013).

Pada penelitian ini akan dilakukan pemecahan masalah melalui analisis terhadap lingkungan eksternal dan internal perusahaan serta melalui *strategic human resource value* dan *branding strategic*, karena jika dilihat dari kondisi yang ada saat ini bank syariah mengalami permasalahan pada segi *branding* dan *human capital* yang dimiliki. Apabila perusahaan mampu melakukan strategik merek dengan baik tentu perusahaan dapat dikenal lebih luas di kalangan masyarakat sehingga mampu bersaing dan berkembang dengan kompetitor yang lain. Lalu kualitas dari sumber daya manusia juga perlu diperhatikan, dengan adanya kepemilikan dari sumber daya manusia yang mumpuni, mampu bersinergi untuk mencapai tujuan perusahaan sehingga tercipta kinerja yang baik. Pendekatan dari strategik ini lebih jauh akan diidentifikasikan dengan kondisi *organizational citizenship behavior* (OCB) serta pengkajian pada lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengajukan penelitian dengan judul **"Model Peningkatan Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia Melalui Pendekatan *Organizational Citizenship Behavior".***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran lingkungan eksternal, lingkungan internal, *strategic human resource value, branding strategic, organizational citizenship behavior* dan kinerja pada perbankan syariah di Indonesia.

2. Apakah terdapat pengaruh lingkungan internal terhadap *strategic human resource value* pada perbankan syariah di Indonesia.
3. Apakah terdapat pengaruh lingkungan internal dan lingkungan eksternal terhadap *strategic branding* pada perbankan syariah di Indonesia.
4. Apakah terdapat pengaruh *strategic human resource value* dan *strategic branding* terhadap *organizational citizenship behavior* pada perbankan syariah di Indonesia.
5. Apakah terdapat pengaruh *strategic human resource value, strategic branding*¸ dan *organizational citizenship behavior* terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Memperoleh temuan bagaimana gambaran lingkungan eksternal, lingkungan internal, *strategic human resource value, branding strategic, organizational citizenship behavior* dan kinerja pada perbankan syariah di Indonesia.
2. Untuk memperoleh temuan apakah terdapat pengaruh lingkungan internal terhadap *strategic human resource value* pada perbankan syariah di Indonesia.
3. Untuk memperoleh temuan apakah terdapat pengaruh lingkungan internal dan lingkungan eksternal terhadap *strategic branding* pada perbankan syariah di Indonesia.
4. Untuk memperoleh temuan apakah terdapat pengaruh *strategic human resource value* dan *strategic branding* terhadap *organizational citizenship behavior* pada perbankan syariah di Indonesia.
5. Untuk memperoleh temuan apakah terdapat pengaruh *strategic human resource value, strategic branding,* dan *organizational citizenship behavior* terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baik dari segi akademik maupun praktik.

1. Kegunaan Akademik

   Dari segi kegunaan akademik, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam pengembangan penelitian lebih lanjut dan juga dapat menambah khasanah pustaka mengenai pengetahuan dalam manajemen pemasaran dan manajemen stratejik khususnya bidang lingkungan eksternal, lingkungan internal *strategic human resource value, branding strategic, organizational citizenship behavior* dan kinerja perbankan syariah.

2. Kegunaan Praktik

   Penelitian ini diharapkan mampu membantu pelaku dalam industri perbankan syariah dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bank-bank syariah sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan yang efektif dan efisien serta menentukan segala kebijakan yang akan dijalankan dalam operasional kegiatan perbankan syariah.

1.5 Struktur Organisasi

Struktur organisasi dalam proposal disertasi ini dibagi menjadi sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, identifikasi dan perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta struktur organisasi penulisan penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Konsep, teori, dan hasil penelitian sebelumnya yang terkait dan relevan dipaparkan dalam bab ini. Secara umum, bab kajian pustaka ini berisi penjelasan tentang konsep teroritis yaitu definisi, dimensi, dan model setiap variabel serta kerangka pemikiran dan hipotesis dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III ini memberikan penjelasan yang rinci tentang metode penelitian yang digunakan sebagai alat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian yang dirumuskan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini mendeskripsikan subjek dan objek penelitian, gambaran umum responden, analisis deskriptif dari setiap variabel yang diteliti, analisis verifikatif hubungan kausal antarvariabel serta pembahasan yang akan digunakan dalam menarik kesimpulan dari setiap hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.

BAB V : SIMPULAN, IMPLEMENTASI DAN REKOMENDASI

Bab ini berisi tentang kesimpulan mengenai hubungan kausal antarvariabel dari hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, serta berisi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan otoritas mengambil kebijakan sebagai implementasi manajerial, selanjutnya menjelaskan tentang keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, dan diharapkan dapat menjadi pedoman bagi peneliti selanjutnya untuk pengembangan perbankan syariah, di Indonesia khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini berisi susunan pustaka-pustaka yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

LAMPIRAN

Bagian lampiran ini menyajikan data kuesioner yang digunakan dalam penelitian.